

## Tim Pokir Rakor Bersama Perangkat Daerah Kaltim



*Sumber gambar : Tribunkaltim.co Jumat, 05/07/2024*

**BALIKPAPAN** – DPRD Provinsi Kaltim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan terkait pembahasan kesepakatan kamus usulan aspirasi perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim dengan Pemerintah Daerah Kaltim di Hotel Platinum Balikpapan, Selasa (2/7)

Ketua Tim Pokir DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu mengatakan Pokir ini dalam rangka untuk merekam semua usulan-usulan baik dari masyarakat maupun pemerintah provinsi. Kemudian usulan-usulan tersebut disepakati dalam kamus yang merujuk penyusunan RKPD Kaltim.

“Memang hari ini pembahasan untuk finalisasi usulan kamus 2024 perubahan. Tapi kita tetap mengacu kamus usulan 2025,” kata politisi PAN ini.

Oleh karena itu, pihaknya terus mendiskusikan berbagai usulan tersebut hingga terkemas dalam Rencana Strategi (Renstra) Pemerintah.

“Jadi usulan-usulan yang masuk ke Renstra itu yang harus dipelototi betul-betul,” ujarnya.

Kamus usulan ini nantinya memuat target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur Kaltim.

Khususnya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, seperti dalam hal perikanan, pertanian, perkebunan termasuk infrastruktur dasar, jalan-jalan yang berada di kabupaten/kota melalui Bantuan Keuangan (Bankeu), dan jalan-jalan provinsi yang menjadi skala prioritas.

Penyusunan Pokir ini, lanjutnya, ditargetkan rampung sebelum RKPD APBD Perubahan. Untuk selanjutnya diinput melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Selain itu, yang menjadi penekanan adalah semua usulan itu harus berkesesuaian dengan aturan.

“Misalnya, aturan atau syaratnya ini ya itu harus dipenuhi. Nah hari inikan kenapa harus cepat menjadi syarat yang harus dikejar itu adalah RKPD APBD Perubahan itu kan paling lambat tanggal 23 Juli 2024 ini. Ini harus diselesaikan kamus-kamus usulannya dan *Alhamdulillah* dari sekian banyak usulan-usulan dari masyarakat dan lewat DPRD itu juga sudah *clear* semua,” bebernya.

la juga menambahkan bahwa hampir semua usulan-usulan mendapatkan tempat atau rumah.

“Kalau tidak bisa di BL ada rumah di kabupaten, kecuali yang satu tadi itu untuk *stunting*, makanan, dan asupan,” jelasnya.

Tampak hadir Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, dan anggota Tim Pokir yakni Yusuf Mustafa, H Baba, A Komariah, Ananda Emira Moeis, Abdul Kadir Tappa, Sapto Setyo Pramono, Eddy Sunardi Darmawan, Jawad Sirajuddin, dan Nidya Listiyono. (adv/hms8)

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Tim Pokir Rakor Bersama Perangkat Daerah Kaltim, 05/07/24

#### **Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.